



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ASNAWI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 60267

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.110.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 367 m2/64 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah Seluas 1.669 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 110.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	101.250.000
1. LAINNYA, SEPEDA FEDERAL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000		
2. MOTOR, SUZUKI TORNADO SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. LAINNYA, FEDERAL SEPEDA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000		
5. MOBIL, SUZUKI KARIMUN MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
6. MOTOR, SUZUKI SMASH TITAN SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
7. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
8. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.300.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	162.059.699
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.388.609.699
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.388.609.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.